

ABSTRAK

Pemerintah daerah selaku pengelola pemerintahan mesti dapat memajukan potensi yang dipegang setiap daerah, seperti perpajakan. Lantaran perpajakan masih merupakan kesanggupan yang lebih yakin bagi daerah untuk mengembangkan penghasilan daerah. (BPHTB) ini termasuk pajak daerah yang potensial. Jadi, dalam Jumlah uang maksimum yang harus dikumpulkan sebelum dana tersebut dapat dimasukkan kekas daerah. Serta patut dijalankan bagi segenap petugas pajak terliput (BPPD). BPPD Kota Bandung sebagai salah satu penanggungjawab pajak daerah masih belum optimal, lantaran belum mencapai target per tahun. Tentu dan perlu untuk melihat penyebabnya BPPD Kota Bandung belum optimalnya dalam pajak BPHTB ini. Tujuan dibuat nya penelitian ini peneliti ingin mengetahui seperti apa optimalisasi pemungutan pajak BPHTB pada BPPD Kota Bandung, dan ingin melihat apa saja hambatan dari pemungutan pajak ini sehingga masih terdapatnya target pajak yang belum tercapai.

Dalam penelitian ini menerapkan teori dari (Rahayu 2020) tentang unsur penting dalam Optimalisasi perpajakan yaitu kepastian UU perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang tepat, tingkat intelektual masyarakat dalam pemahaman perpajakan, dan kualitas fiskus. Metode penulisan menerapkan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni observasi, interview; Dokumen dan audiovisual (BPPD Kota Bandung), serta penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian optimalisasi pajak BPHTB pada BPPD Kota Bandung Sepenuhnya efektif, hasil pada tiap tahunnya mengalaih kenaikan dan penurunan, meskipun tidak memenuhi target. Kendala masih minimnya sarana prasarana pada pengadministrasian unit internal, sangat rendahnya Kesadaran masyarakat akan proses validitas sertifikat dan masih laporan tersebut mengacu pada jumlah wajib pajak dalam NJOP, yang seharusnya Mengacu pada NPOP.

Kata kunci : Optimalisasi, BPHTB

ABSTRACT

Local governments as government administrators must be able to maximize the potential of each region, one of which is taxation. Because taxation is still a very reliable potential for regions to develop regional income. The cost of acquiring land and building rights (BPHTB) is one of the potential local taxes. So, the maximum amount of money that must be collected before these funds can be put into the regional treasury. This must be done by all tax officers including the Bandung City Regional Revenue Management Agency (BPPD). BPPD Bandung City as one of the local tax organizers is still not optimal, because it does not reach the target every year. Of course and it is necessary to look at the cause of the Bandung City BPPD not being optimal in this BPHTB tax. The purpose of this research is to find out what the optimization of BPHTB tax collection at BPPD Bandung City is, and want to see what are the obstacles to this tax collection so that there are still tax targets that have not been achieved.

In this study, applying the theory from (Rahayu 2020) about the important elements in tax optimization, namely the certainty of tax laws, the right tax administration system, the intellectual level of the community in understanding taxation, and the quality of the tax authorities. The writing method applies a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews; Documents and audiovisual BPPD Bandung, as well as library research.

Based on the results of the research, the collection of BPHTB BPPD Bandung City is Fully effective, the results of each year experience increases and decreases, although they do not meet the target. Constraints are the lack of infrastructure for the administration of internal units, very low public awareness of the certificate validity process and the report still refers to the number of taxpayers in the NJOP, which should refer to the NPOP.

Keywords: Optimization, BPHTB